

► HIBAH BANSOS

Lembaga Fiktif Turut Menikmati Bantuan Hibah

BALAI KOTA—Fenomena macetnya laporan pertanggungjawaban (LPj) hibah dan bantuan sosial (bansos) tak lepas dari maraknya lembaga fiktif yang mengajukan dana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, saat ditemui *Espos* di Balai Kota, Senin (3/3), tak memungkiri adanya lembaga fiktif yang turut mengambil dana hibah bansos pada 2012 lalu. Fenomena ini memicu tingginya LPj bantuan 2012 yang belum tertagih yakni senilai Rp29 miliar. Menurut Sekda, temuan itu terungkap dalam pemeriksaan aliran dana hibah dan bansos oleh Inspektorat. “Ada yang seperti itu (lembaga fiktif). Legalitasnya dipertanyakan,” ujar dia.

Selain keberadaan lembaga fiktif, macetnya penyusunan LPj disinyalir akibat penyalahgunaan dana hibah. Sekda menjelaskan ada beberapa bantuan yang justru tidak sampai ke lembaga bersangkutan. “Ada lembaganya tapi mereka tidak menerima. Kami sudah meminta Inspektorat beraksi untuk hal-hal ini,” tutur dia.

Pihaknya pun sependapat dengan usulan DPRD terkait wacana *blacklist* penerima dana hibah nakal. Menurutnya, saat inilah momentum Pemkot untuk menghapus permainan dana hibah. Sekda mengakui selama ini belum ada sanksi *blacklist* bagi penerima hibah yang tak menyerahkan LPj. “Belum ada. Ini justru momen yang baik untuk memulainya [*blacklist*].”

Sementara itu Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, tak akan segan mencoret penerima hibah nakal

dari daftar bantuan. Pasalnya, ulah penerima hibah itu memicu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum menjatuhkan *blacklist*, Rudy meminta Inspektorat mengklarifikasi penerima bantuan. “Pokoknya saya enggak mau diajak main-main, termasuk memotong dana bantuan. Ini duit rakyat,” tutur dia.

Selesai 50 Persen

Kepala Inspektorat Solo, Utara, terus menelusuri sejumlah LPj hibah yang belum beres. Pihaknya mengklaim telah merampungkan 50 persen lebih LPj yang macet pada 2012. Untuk penerima hibah yang tak kunjung menyerahkan laporan, pihaknya bakal menjatuhkan sanksi pengembalian bantuan. “Nanti akan kami cek dananya, benar-benar digunakan seperti yang tertulis di proposal tidak. Kalau tidak ya kami minta dikembalikan,” tegas dia.

Disinggung jumlah lembaga fiktif yang ikut menikmati dana bantuan, Utara enggan menjawab gamblang. Namun dia mengakui ada indikasi lembaga fiktif dalam keterlambatan pengurusan LPj. “Kalau ada lembaganya dan proposal sesuai aturan, pasti LPj-nya lancar. Kalau tidak ya pasti ada indikasi,” tutur dia.

Lebih jauh, Utara enggan terburu-buru dalam merampungkan kasus LPj hibah. Selain perlu berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, pihaknya mengatakan bantuan ini terkait rakyat. “Jadi kami butuh waktu dan kecermatan.” (Chrisna Chanis Cara)